

---

## PERENCANAAN PENEMPATAN WARGA TRANSMIGRASI OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOALEMO

**Ellys Rachman**  
**STIA Bina Taruna Gorontalo**  
[ellysrachman12@gmail.com](mailto:ellysrachman12@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Perencanaan Penempatan Warga Transmigrasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo. Fokus penelitian ini dijabarkan ke dalam 2 (dua) dimensi perencanaan, yaitu: Dimensi perencanaan terintegrasi, dan Dimensi perencanaan komprehensif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan pedoman wawancara dengan 6 orang informan, dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang difokuskan pada: perencanaan penempatan warga transmigrasi, yang dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo.

Berdasarkan analisis data maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Perencanaan penempatan warga transmigrasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo masih kurang terintegrasi, yang disebabkan oleh lemahnya koordinasi, komunikasi dan kerjasama lintas sektoral, dan perencanaan penempatan warga transmigrasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo masih kurang komprehensif, yang disebabkan oleh kurangnya keterlibatan sektor lain melakukan survey, identifikasi maupun pendataan terhadap daya dukung wilayah/area penempatan.

Berdasarkan simpulan tersebut di atas maka dapat diajukan beberapa saran, di antaranya: Jalinan koordinasi, komunikasi dan kerjasama perlu ditingkatkan untuk mencapai suatu perencanaan yang terintegrasi dengan baik dalam mensukseskan pelaksanaan program transmigrasi di Kabupaten Boalemo. Perlunya peningkatan keterlibatan dan kepedulian dari seluruh instansi yang terkait dalam perencanaan daya dukung area penempatan warga transmigrasi, agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan.

**Kata Kunci: Perencanaan, Penempatan, Transmigrasi**

---

### PENDAHULUAN

Indonesia dengan jumlah penduduk yang semakin padat terutama di daerah Jawa, menyebabkan ketidakseimbangan wilayah dengan kebutuhan masyarakat yang senantiasa

membutuhkan tempat tinggal dan mata pencaharian. Ketidakseimbangan ini pula menyebabkan terjadinya eksploitasi lahan sehingga memberikan dampak buruk terhadap ekosistem dan mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan. Di daerah-daerah

dengan jumlah penduduk yang padat di antaranya daerah Jawa, Sumatera, Bali, dan daerah lainnya, memberikan efek terhadap kehidupan ekonomi yang rendah terutama bagi kalangan masyarakat dengan mata pencaharian petani, nelayan, maupun buruh penggarap. Kondisi demikian selanjutnya memberikan implikasi terhadap kondisi ekonomi secara nasional dan fenomena kemiskinan semakin mewarnai kehidupan masyarakat bawah.

Kepedulian pemerintah terhadap perbaikan kondisi lingkungan, ekosistem, dan ekonomi masyarakat serta fenomena kemiskinan akibat dampak dari kepadatan jumlah penduduk pada beberapa daerah/wilayah tertentu di Indonesia, melahirkan suatu program kebijakan yang sejak pemerintahan orde baru telah dikenal dengan transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain di dalam negeri, dengan tujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk dan memperbaiki kehidupan ekonomi warga transmigrasi (transmigran).

Kebijakan tentang transmigrasi hingga orde reformasi saat ini terus berlanjut dengan berbagai pendekatan dan mekanisme yang digunakan. Tujuannya adalah untuk mencapai kesuksesan kebijakan tersebut, dimana para warga transmigrasi (transmigran) betah dan menetap di wilayah/daerah baru yang jadi sasaran transmigrasi dengan perkembangan kondisi sosial dan ekonomi yang makin membaik. Hingga lahirnya otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 sebagai bentuk perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana semakin banyak terjadi pemekaran daerah baik provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa, yang memberikan peluang besar dalam kewenangannya mengelola dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki. Daerah-daerah ini pun terutama daerah kabupaten melalui instansi teknisnya menyediakan lahan/area transmigrasi sebagai bentuk dukungan dan kepedulian atas kebijakan pemerintah pusat dan kepedulian terhadap kehidupan sesama warga Negara.

Kabupaten Boalemo adalah salah satu daerah di Provinsi Gorontalo yang melaksanakan kebijakan program transmigrasi, yaitu sebagai daerah tempat tujuan/penerima warga transmigrasi (transmigran) dari beberapa daerah di luar Provinsi Gorontalo. Kebijakan ini dilaksanakan secara teknis oleh pemerintah daerah Kabupaten Boalemo melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai penanggung jawab, dan bekerja sama dengan beberapa instansi terkait. Mekanisme pendanaan penempatan warga transmigrasi ini melalui sistem dana *sharing* dengan pemerintah pusat terutama menyangkut biaya jaminan hidup tahun pertama bagi transmigran. Pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk jaminan hidup selama 9 (sembilan) bulan dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk

jaminan hidup selama 3 (tiga) bulan. Oleh sebab itu perlu adanya perencanaan yang matang dalam menentukan penempatan warga transmigrasi tersebut dengan mempertimbangkan berbagai aspek pendukungnya, baik kondisi geografis, sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya agar keberhasilan program transmigrasi dapat dicapai dan memberikan manfaat bagi warga transmigrasi.

Perencanaan adalah hal penting yang harus dilakukan oleh setiap organisasi apapun tujuannya dan apapun kegiatannya tanpa melihat apakah organisasi bersangkutan besar atau kecil. Demikian pula halnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai salah satu organisasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam keberhasilan program transmigrasi di wilayah Kabupaten Boalemo, mutlak untuk merencanakan setiap detail operasional kegiatannya terutama menyangkut kesesuaian penempatan warga transmigrasi, agar dapat dicapai tujuan dan sasaran ditetapkannya program transmigrasi di Kabupaten Boalemo.

Sejak tahun 2005 silam, jumlah warga transmigrasi yang ditempatkan di Kabupaten Boalemo telah mencapai 1.465 Kepala Keluarga, yang ditempatkan di 4 (empat) desa yakni di wilayah Kecamatan Wonosari di 2 (dua) Desa yaitu Desa Pangea dan Desa Sari Tani, dan di Kecamatan Paguyaman di 2 (dua) Desa yaitu Desa Bualo dan Desa Bongo IV, dengan kategori penduduk transmigrasi adalah petani. Selanjutnya pada tahun 2013 mendatang direncanakan akan

ditempatkan lagi warga transmigrasi sebanyak 400 KK. Dengan melihat jumlah warga transmigrasi yang ditempatkan di Wilayah Kabupaten Boalemo, tampak bahwa program transmigrasi ini berjalan dengan baik.

Namun disisi lain, layaknya pelaksanaan sebuah program pada umumnya, penempatan warga transmigrasi ini pun tidak luput dari berbagai permasalahan. Permasalahan ini ditunjukkan oleh kenyataan di lapangan bahwa dari jumlah transmigran yang ditempatkan di Kabupaten Boalemo, pada tahun 2011 tercatat sebanyak 55 KK telah kembali ke daerah asal. Kembalinya warga transmigrasi ke daerah asalnya disebabkan oleh beberapa permasalahan yang ditimbulkan oleh kondisi lokasi penempatan warga transmigrasi yang kurang sesuai dengan harapan.

Kurang sesuainya lokasi penempatan warga transmigrasi ini diasumsikan penyebabnya berhubungan dengan perencanaan lokasi penempatan warga transmigrasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan warga itu sendiri. Asumsi ini didasarkan pada realita yang ada, bahwa perencanaan lokasi penempatan warga transmigrasi belum dilakukan secara terintegrasi, dimana dalam merencanakan lokasi penempatan warga transmigrasi seharusnya dilakukan secara bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya seperti Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, PU, dan instansi terkait lainnya untuk menetapkan lokasi dan daya dukungnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Hal ini

tampak pada kurangnya kerjasama, koordinasi dan komunikasi mulai dari hal pengidentifikasian hingga penetapan rencana. Kurang terintegrasinya perencanaan ini menyebabkan lokasi penempatan warga transmigrasi terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga transmigran itu sendiri.

Penyebab lainnya adalah perencanaan yang kurang komprehensif, terutama menyangkut identifikasi berbagai hambatan dan kendala pada lokasi yang menjadi target penempatan warga transmigrasi secara luas dan lengkap dari semua aspek dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi geografis kawasan serta kesesuaian daya dukung areal. Ini tampak pada letak dan daya dukung lahan pertanian atau lahan garapan yang jauh dari tempat pemukiman, akses jalan ke lokasi areal garapan yang sulit sehingga mobilisasi para transmigran ini sering terhambat baik pra maupun pascapenempatan, sehingga menimbulkan efek pada produksi dan tingkat produktivitas rendah yang berarti tingkat keberhasilan yang dicapai oleh warga transmigrasi pun cenderung rendah dan kurang memuaskan. Selain itu dukungan ketersediaan air bersih, sarana kesehatan, pendidikan, maupun menyangkut jaminan hidup bagi warga transmigrasi di awal penempatannya pun tidak terakumulasi dalam perencanaan secara teknis. Akibatnya warga transmigrasi merasakan dampak yang kurang memuaskan bagi perubahan kondisi kehidupan mereka sehingga sebagian besar warga

transmigrasi memilih untuk kembali ke daerah asalnya.

Adanya permasalahan menyangkut perencanaan penempatan warga transmigrasi tersebut di atas perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan harus segera dilakukan solusi pemecahannya agar masalah tersebut tidak berlangsung terus menerus sehingga dapat menyebabkan kegagalan program secara keseluruhan. Di samping itu perlu dilakukan identifikasi masalah secara keseluruhan sehingga diperoleh berbagai penyebab timbulnya masalah secara komprehensif sehingga untuk perencanaan penempatan warga transmigrasi pada tahun mendatang dapat dilakukan dengan lebih baik.

## **PERMASALAHAN**

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut: “Apakah perencanaan penempatan warga transmigrasi Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo telah dilakukan dengan baik”.

## **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perencanaan penempatan warga transmigrasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo telah dilakukan dengan baik.

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

### Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis; penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai: a. Kontribusi pemikiran dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya bidang kajian ilmu manajemen; b. Bahan kajian dan referensi bagi penelitian lanjutan khususnya mengenai perencanaan penempatan warga transmigrasi.
2. Manfaat Praktis; penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai: a. Kontribusi pemikiran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo umumnya dan khususnya kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pelaksanaan program transmigrasi; b. Bahan perbandingan dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo umumnya dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi khususnya, dalam upaya memperbaiki sistem perencanaan penempatan warga transmigrasi untuk mencapai tujuan ditetapkan program transmigrasi.

### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan survey.

Data diperoleh melalui observasi atau pengamatan langsung

kondisi di lapangan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai permasalahan yang terjadi, dan melakukan wawancara secara interaktif dengan informan serta dokumentasi berupa data-data sekunder melalui buku-buku, laporan-laporan dan dokumen lain yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

### Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada perencanaan penempatan warga transmigrasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo. Untuk mencapai tujuan penelitian dan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, maka fokus penelitian ini diuraikan ke dalam 2 (dua) dimensi perencanaan, yaitu: Dimensi Perencanaan Terintegrasi, dan Dimensi Perencanaan Komprehensif.

1. Dimensi Perencanaan Terintegrasi adalah perencanaan yang dibuat secara terintegrasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo dengan instansi terkait lainnya dalam perencanaan penempatan warga transmigrasi, yang mencakup bidang permasalahan tertentu melalui kerjasama, koordinasi dan komunikasi lintas-sektoral.
2. Dimensi Perencanaan Komprehensif adalah upaya mengidentifikasi masalah-masalah secara menyeluruh dalam perencanaan penempatan warga transmigrasi, melalui identifikasi daya dukung lahan mata pencaharian, akses transportasi, kondisi sosial-budaya, aspek

pendukung lainnya, dan jaminan hidup.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Dimensi Perencanaan Terintegrasi**

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan atau keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat.

Dalam kaitannya dengan perencanaan penempatan warga transmigrasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo, maka perencanaan harus dipandang dari segi pembangunan. Perencanaan pembangunan mengacu pada berbagai dimensi pembangunan yang saling berkaitan erat antara sistem, nilai, gerakan, metode, strategi, dan indikator yang menjadi domain setiap daerah. Perencanaan pembangunan sebagai sebuah sistem, mencakup komponen masukan, terdiri dari nilai, sumber daya manusia, alam, budaya dan kelembagaan masyarakat, komponen proses terdiri dari kemampuan organisasi dan manajemen pemerintahan dalam melaksanakan program. Komponen keluaran berupa perubahan kualitas perilaku yang berakses pada kognisi, afeksi, dan keterampilan yang berkaitan dengan taraf hidupnya. Perencanaan pembangunan sebagai sebuah

gerakan, mengandung makna bahwa pembangunan adalah usaha yang terorganisasi terarah dan dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, maka penyusunan dan penetapan rencana harus dilaksanakan secara terintegrasi. Perencanaan terintegrasi ini berarti melibatkan semua unit/sector, dengan menekankan pada peran multi-sektoral untuk sebuah kegiatan yang bersifat terintegrasi.

Perencanaan yang terintegrasi mencakup bidang permasalahan tertentu dalam suatu area yang sama sehingga memerlukan kerjasama lintas-sektoral untuk menghasilkan suatu perencanaan. Perencanaan terintegrasi merupakan perencanaan yang dilakukan secara lintas sektoral dengan permasalahan yang multi-sektoral yang terjadi pada suatu area tertentu, sehingga memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik dari seluruh unit/sector sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Namun pada kenyataannya, penempatan warga transmigrasi di Kabupaten Boalemo masih sering menimbulkan persoalan, terutama yang bersumber dari kurangnya kenyamanan para warga transmigrasi setelah menempati wilayah yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai instansi penanggung jawab penyelenggaraan program transmigrasi.

Berdasarkan pengamatan di lapangan menyangkut integrasi berbagai sector yang saling menunjang dalam mempersiapkan



wilayah yang akan ditetapkan sebagai lokasi transmigrasi adalah kurang begitu baik. Sebab dari sekian banyak sektor yang seharusnya terlibat secara aktif, hanya beberapa sektor saja yang terlibat aktif dalam pemetaan wilayah transmigrasi dan penyusunan rencana penempatan warga transmigrasi. Sebagian besar sektor-sektor tersebut tidak terintegrasi dengan baik, sebab dalam perencanaan yang dilakukan secara intensif hanya sektor transmigrasi yang berada langsung di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo. Sedangkan sektor lainnya lebih sering hanya memasukkan *planning* dalam bentuk draft potensi wilayah sesuai sektor masing-masing.

Padahal dalam perencanaan yang terintegrasi seharusnya bukan saja hanya dilakukan pemetaan secara teoritis, namun juga penting untuk dilakukan pengamatan dan survey langsung kondisi lokasi penempatan, agar dapat diketahui berbagai aspek yang menjadi pendukung atau penghambat dan faktor-faktor yang mungkin akan menimbulkan persoalan dikemudian hari.

Untuk mencapai perencanaan yang terintegrasi tersebut diperlukan koordinasi dan komunikasi lintas sektoral dalam melaksanakan perencanaan penempatan warga transmigrasi di wilayah Kabupaten Boalemo. Namun yang terjadi adalah kurangnya jalinan koordinasi dan komunikasi lintas sektoral sehingga perencanaan yang dihasilkan dipandang masih kurang sesuai, dan hal itu kemudian memicu timbulnya

persoalan seperti kembalinya warga transmigrasi ke daerah asal mereka disebabkan oleh ketidaknyamanan dan kurangnya daya dukung wilayah/lokasi penempatan yang ditetapkan.

Lemahnya jalinan koordinasi dan komunikasi tersebut selanjutnya turut pula mempengaruhi kerjasama lintas sektoral yang seharusnya terjalin dengan baik, sebagai sesama lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan program transmigrasi di daerah ini.

Perencanaan yang terintegrasi bertujuan untuk menyusun strategi, rumusan, metode, teknik, dan prosedur untuk melaksanakan suatu gerak perubahan dan pertumbuhan dari berbagai bidang baik ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, maupun politik. Seluruh tahapan kegiatan tersebut memerlukan perencanaan sebagai landasan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya perencanaan yang terintegrasi dengan baik, maka dapat diketahui secara rinci segala tahapan atau langkah-langkah yang harus ditempuh, tujuannya bagaimana, dan dapat diprediksikan apakah rencana tersebut dapat diwujudkan atau tidak.

### **Dimensi Perencanaan Komprehensif**

Perencanaan komprehensif adalah perencanaan yang berupaya memahami masalah-masalah secara menyeluruh dan lengkap dengan melibatkan berbagai aspek dan bidang terkait untuk memberikan rekomendasi yang bersifat membangun dan mengarahkan kebijakan atau keputusan para

pejabat yang berwenang untuk menentukan tindakan. perencanaan komprehensif untuk suatu kegiatan dengan mengidentifikasi dan mempertimbangkan aspek-aspek daya dukung area sebelum ditetapkan menjadi sebuah rencana.

Untuk memperoleh gambaran mengenai daya dukung lokasi penempatan warga transmigrasi perlu dilakukan pemetaan lokasi, survey lokasi, pendataan dan pengidentifikasian berbagai daya dukung, baik dukungan sumber daya alam maupun sumber daya lainnya seperti transportasi, pemasaran dan perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu adanya perencanaan secara komprehensif yang harus dilakukan oleh seluruh bidang/sector terkait guna memperoleh suatu rencana wilayah strategis untuk penempatan warga transmigrasi.

Areal penempatan warga transmigrasi idealnya harus disiapkan secara komprehensif, artinya seluruh aspek pendukung harus dipertimbangkan dan disiapkan sesuai kondisi warga transmigrasi, misalnya dengan mempersiapkan lahan pertanian yang produktif bagi warga transmigrasi dengan mata pencaharian sebagai petani, menyiapkan akses transportasi dan komunikasi, akses pendidikan, akses kesehatan, dan membuka akses pemasaran hasil produksi warga transmigrasi. Kesiapan seluruh daya dukung tersebut dapat dilakukan apabila terdapat perencanaan secara komprehensif yang berarti mencakup seluruh aspek atau seluruh daya

dukung area penempatan warga transmigrasi.

Data sekunder yang diperoleh di lapangan melalui draft rencana penempatan warga transmigrasi sebagaimana yang tertuang dalam Profil Wilayah Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012, telah dituangkan berbagai sumber daya pendukung atau daya dukung wilayah masing-masing sasaran penempatan. Namun dari 3 (tiga) wilayah sasaran yang telah ditetapkan, daya dukung pasar, pendidikan dan kesehatan yang kurang mendukung.

Lemahnya daya dukung ketiga aspek tersebut menurut pengamatan peneliti disebabkan oleh kurangnya ketersediaan anggaran biaya. Untuk menyiapkan hal tersebut dilaksanakan secara bertahap melalui pengalokasian anggaran baik melalui APBD maupun APBN, dan yang sering terjadi adalah pembangunan sector tersebut dilakukan setelah ada penempatan warga terlebih dahulu.

Perencanaan penempatan warga transmigrasi merupakan perencanaan dalam pembangunan yaitu suatu proses pemilihan fakta-fakta, indikator-indikator, dan daya dukung kawasan, serta usaha menghubungkan antara fakta dan indikator serta daya dukung kawasan tersebut, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang mungkin diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.

Perencanaan penempatan warga transmigrasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Kabupaten Boalemo adalah sebagai tindakan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan. Pada umumnya harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan beberapa aspek penting, yaitu: (1) Tujuan akhir yang ingin dicapai; (2) Sasaran-sasaran dan prioritas untuk merealisasikan tujuan akhir; (3) Jangka waktu yang diperlukan dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut; (4) Deskripsi masalah-masalah yang dihadapi; (5) Modal dan sumber daya-sumber daya yang akan digunakan, serta pengalokasiannya; (6) Kebijakan-kebijaksanaan untuk merealisasikannya; (7) Orang, organisasi atau badan pelaksananya, dan (8) Mekanisme pemantauan, pengawasan pelaksanaan, dan evaluasi.

Hal tersebut di atas dapat diwujudkan apabila dalam perencanaan dilakukan secara komprehensif sehingga melahirkan suatu rencana yang benar-benar lengkap dan saling menunjang pada semua sektor/bidang. Namun yang terjadi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo adalah kurang komprehensifnya rencana yang dihasilkan.

### SIMPULAN

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan atas hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Perencanaan penempatan warga transmigrasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo masih kurang terintegrasi, yang disebabkan oleh lemahnya koordinasi, komunikasi

dan kerjasama lintas sektoral; (2) Perencanaan penempatan warga transmigrasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo masih kurang komprehensif, yang disebabkan oleh kurangnya keterlibatan sektor lain dalam melakukan survey, identifikasi maupun pendataan terhadap daya dukung wilayah/areal penempatan.

### SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran diantaranya: (1) Jalinan koordinasi, komunikasi dan kerjasama perlu ditingkatkan untuk mencapai suatu perencanaan yang terintegrasi dengan baik dalam mensukseskan pelaksanaan program transmigrasi di Kabupaten Boalemo; (2) Perlunya peningkatan keterlibatan dan kepedulian dari seluruh instansi yang terkait dalam perencanaan daya dukung areal penempatan warga transmigrasi, agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2010, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Adisubrta, Winarna Surya., 2010, *Etika Pemerintahan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Afiffuddin, 2010, *Pengantar Administrasi Pembangunan (Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi)*, CV. Alfabeta, Bandung

- Ali, Faried, 1997, *Metodologi Penelitian Sosial dalam Bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan*, Cet. Pertama, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta
- Athoillah, H. M. Anton., 2010, *Dasar-Dasar Manajemen*, Pustaka Setia, Bandung
- Brotosunaryo, P.M., 2001, *Analisis Pengembangan Kota dan Wilayah*” Universitas Diponegoro, Semarang
- Fathoni, H. Abdurrahmat., 2006, *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Handoko, T. Hani., 2011, *Manajemen*, Edisi kedua, BPFE, Yogyakarta
- Hasibuan, H. Melayu. S.P. 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ed. Revisi, Bumi Aksara, Jakarta
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu., 2009, *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Cetakan Keempat, Refika Aditama, Bandung
- Samsudin, Sadili. H. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Pustaka Setia, Bandung
- Siagian, Sondang P., 2008, *Filsafat Administrasi*, Ed. Revisi, Bumi Aksara, Jakarta
- Sihotang, A., 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Paradnya Paramitha, Jakarta
- Soemarwoto, Otto. 2005, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Sugiyono., 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Ed. Revisi Cet. 15, Alfabeta, Bandung
- , 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Ed. Revisi Cet. Ke -10, Alfabeta, Bandung
- Sukirno, S., 2005, *Ekonomi Pembangunan: Proses Masalah Dan Dasar Kebijakan*, Kerjasama Penerbit Fakultas Ekonomi UI dengan Bina Grafika, Jakarta
- Suprpto, Tommy. 2009, *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*, Media Pressindo, Yogyakarta
- Suradinata, Ermaya. 2003, *Administrasi Lingkungan Dalam Ekologi Pemerintahan dan Pembangunan*, Ramadalam Citra Grafika, Bandung
- Suryono, Agus., 2010, *Teori dan Isu Pembangunan*, Universitas Negeri Malang (UNM), Malang
- Terry, George.R., 2008, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Cet. Ke 9., BUmi Aksara, Jakarta
- Profil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo, Tahun 2012.